



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

Palembang, 16 April 2025

Nomor : 800/5018/BKD.Sekr/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Exp
Hal : Penyampaian LAKjIP TW I TA 2025 BKD Prov. Sumsel

Yth : Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel
di
Palembang

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKjIP) Triwulan I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berikut soft copy sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 196812151989031002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TRIWULAN I TAHUN 2025



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Adapun Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 Triwulan I berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik (%)
			(Rp)	%	
1	2	3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	22,508,607,831	3,461,895,673	15.38	16.30
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130,000,000	-	0.00	28.68
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	-	0.00	12.50
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30,000,000	-	0.00	6.25
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	-	0.00	58.33
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,367,105,324	3,218,977,571	20.95	20.95
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,991,570,000	3,218,977,571	21.47	21.47
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	375,535,324	-	0.00	0.00
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	736,235,507	-	0.00	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000	-	0.00	0.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136,235,507	-	0.00	50.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400,000,000	-	0.00	0.00
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,197,000,000	34,089,916	2.85	10.26
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	-	0.00	0.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360,000,000	-	0.00	0.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000	-	0.00	0.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17,000,000	1,850,000	10.88	16.66
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	-	0.00	0.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480,000,000	32,239,916	6.72	25.00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,000,000	-	0.00	0.00
05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,535,000,000	-	0.00	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700,000,000	-	0.00	0.00
2	Pengadaan Mebel	385,000,000	-	0.00	0.00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250,000,000	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	-	0.00	0.00
06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,360,880,000	194,517,986	14.29	18.90
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000	-	0.00	0.00

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	77,271,986	20.33	25.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	972,880,000	117,246,000	12.05	16.67
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,182,387,000	14,310,200	0.66	1.53
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,000,000	14,310,200	3.58	8.33
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	-	0.00	0.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,732,387,000	-	0.00	0.00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,947,910,000	48,370,000	2.48	12.65
08	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	610,250,000	-	0.00	13.56
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	256,000,000	-	0.00	11.54
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200,000,000	-	0.00	22.00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	154,250,000	-	0.00	5.96
09	Mutasi dan Promosi ASN	599,415,000	-	0.00	2.66
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	49,415,000	-	0.00	23.48
2	Pengelolaan Promosi ASN	550,000,000	-	0.00	0.55
10	Pengembangan Kompetensi ASN	339,415,000	48,370,000	14.25	31.79
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	285,000,000	47,970,000	16.83	31.94
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	54,415,000	400,000	0.74	31.00
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	398,830,000	-	0.00	10.33
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49,415,000	-	0.00	25.00
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	300,000,000	-	0.00	0.00
3	Pembinaan Disiplin ASN	49,415,000	-	0.00	58.37
TOTAL		24,456,517,831	3,510,265,673	14.35	16.01

C. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian Outcome)

Indikator kinerja berdasarkan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026:

INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.SUMSEL

Berdasarkan RENSTRA 2025 (Triwulan I)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi per Maret	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	-	-
		Nilai NSPK	%	90	-	-
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	651,80	100
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	15,75	100
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	89,96	100
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	83,19	92,43

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2024			Faktor Penghambat/ Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW III	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	651,80	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	15,75	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	89,96	100	Telah sesuai target

D. ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
INDIKATOR KINERJA SKPD DILIHAT PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
						Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi Per Des 2024	Capaian	Ket
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	Persentase	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	67,14	100	76	81,36	100	81	-	-	Nilai IP ASN untuk Tahun 2025 belum release dari BKN
			Nilai NSPK	Persentase	Nilai NSPK Prov. Sumsel dari BKN		65,47		71	94,375	100	90	-	-	Nilai NSPK untuk Tahun 2025 belum release dari BKN
		2. Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	613,86	100	100	636,65	100	100	651,80	100	Telah sesuai target
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46	14,21	100	9	15,27	100	12	15,75	100	Telah sesuai target
			Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100	100	80	89,96	100	Telah sesuai target
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87	90,92	100	88	90,52	100	90	83,19	92,43	Realisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Triwulan I Tahun 2025 sebesar 92,43%, nilai ini belum mencapai target dikarenakan masih TW I dan terus berproses

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Dari 3 (tiga) Sasaran yang telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disampaikan bahwa:

- untuk **Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel** dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel, Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Nilai NSPK Prov. Sumsel belum rilis dari pusat.
- Pada sasaran (2) Meningkatnya Tata Kelola ASN, semua indikator kinerja telah mencapai target.
- Sedangkan untuk indikator Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian realisasinya sebesar 83,19 atau capaian 92,43%.

B. Solusi

Secara keseluruhan sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan harapan. Saat ini, seluruh kegiatan dan pelayanan kepegawaian masih berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2025, sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan serangkaian program yang mengacu kepada misi yang diuraikan kedalam tujuan, sasaran dan kebijakan serta realisasi dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih diperlukan penyempurnaan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memperoleh predikat yang semakin baik, dan sekaligus merupakan instrumen pendukung guna meningkatkan predikat penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian yang dapat kami laporkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 31 Maret 2025
Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

Palembang, 15 Juli 2025

Nomor : 800/10336/BKD.Sekr/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Exp
Hal : Penyampaian LAKjIP TW II TA 2025 BKD Prov. Sumsel

Yth : Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel
di
Palembang

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKjIP) Triwulan II Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berikut soft copy sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 196812151989031002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TRIWULAN II TAHUN 2025



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Adapun Rincian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025 Triwulan II berdasarkan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Fisik (%)
			Keuangan		
			(Rp)	%	
1	2	3	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	18,369,930,798	7,434,997,132	40.47	40.56
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,390,000	-	0.00	51.32
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,130,000	-	0.00	31.25
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,130,000	-	0.00	50.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,130,000	-	0.00	72.22
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,561,694,260	6,830,223,649	43.89	43.89
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,271,774,260	6,830,095,149	44.72	44.72
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	289,920,000	128,500	0.04	0.04
03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246,010,254	29,286,000	11.90	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155,000,000	-	0.00	0.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,010,254	29,286,000	32.18	50.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747,150,000	79,643,636	10.66	11.91
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,500,000	-	0.00	0.00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242,000,000	-	0.00	0.00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210,000,000	20,316,200	9.67	9.67
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,900,000	3,700,000	31.09	31.09
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	-	0.00	0.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,000,000	55,627,436	21.40	25.00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12,750,000	-	0.00	0.00
05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-	0.00	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	-	0.00	0.00
2	Pengadaan Mebel	0	-	0.00	0.00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	0.00	0.00
06	Penyediaan Jasa Penunjang	1,145,002,000	410,195,547	35.82	35.83

	Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	-	0.00	0.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380,000,000	152,060,547	40.02	40.02
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761,002,000	258,135,000	33.92	33.92
07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598,684,284	85,648,300	14.31	14.31
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	282,000,000	79,265,800	28.11	28.11
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	6,382,500	18.24	18.24
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281,684,284	-	0.00	0.00
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,604,412,308	167,468,000	6.43	37.92
08	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	497,750,000	52,058,000	10.46	37.33
1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	216,000,000	27,578,000	12.77	24.50
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	128,000,000	-	0.00	69.00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153,750,000	24,480,000	15.92	28.99
09	Mutasi dan Promosi ASN	1,783,221,808	30,060,000	1.69	38.48
1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	27,621,808	-	0.00	38.97
2	Pengelolaan Promosi ASN	1,755,600,000	30,060,000	1.71	37.87
10	Pengembangan Kompetensi ASN	245,492,500	85,350,000	34.77	41.49
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	213,220,000	84,440,000	39.60	39.60
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	32,272,500	910,000	2.82	54.01
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	77,948,000	-	0.00	31.32
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31,190,500	-	0.00	47.22
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	32,600,000	-	0.00	0.00
3	Pembinaan Disiplin ASN	14,157,500	-	0.00	68.39
TOTAL		20,974,343,106	7,602,465,132	36.25	40.23

C. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA (Pencapaian Outcome)

Indikator kinerja berdasarkan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026:

INDIKATOR KINERJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.SUMSEL Berdasarkan RENSTRA 2025 (Triwulan II)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi per Maret	Capaian
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	-	-
		Nilai NSPK	%	90	-	-
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	666,82	100
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	16,58	100
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	84,51	100
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	87,44	97,15

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/ Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW II	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	666,82	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	16,58	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	84,51	100	Telah sesuai target

D. ANALISIS ATAS REALISASI CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2025
INDIKATOR KINERJA SKPD DILIHAT PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			
						Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi Per Juni 2025	Capaian	Ket
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara Secara Efisien dan Efektif dalam Pelayanan Publik Secara Profesional	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN	1. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	Persentase	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin)	67	67,14	100	76	81,36	100	81	-	-	Nilai IP ASN untuk Tahun 2025 belum release dari BKN
			Nilai NSPK	Persentase	Nilai NSPK Prov. Sumsel dari BKN		65,47		71	94,375	100	90	-	-	Nilai NSPK untuk Tahun 2025 belum release dari BKN
		2. Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	613,86	100	100	636,65	100	100	666,82	100	Telah sesuai target
			Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9,46	14,21	100	9	15,27	100	12	16,58	100	Telah sesuai target
			Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100	100	80	84,51	100	Telah sesuai target
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	%	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian	87	90,92	100	88	90,52	100	90	87,44	97,15	Realisasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 87,44%, nilai ini belum mencapai target dikarenakan masih TW II dan terus berproses

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

Dari 3 (tiga) Sasaran yang telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disampaikan bahwa:

- untuk **Sasaran 1 : Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemprov. Sumsel** dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks IP ASN Prov. Sumsel, Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Nilai NSPK Prov. Sumsel belum rilis dari pusat.
- Pada sasaran (2) Meningkatnya Tata Kelola ASN, semua indikator kinerja telah mencapai target.
- Sedangkan untuk indikator Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari Pelayanan Kepegawaian realisasinya sebesar 87,44 atau capaian 97,15%.

B. Solusi

Secara keseluruhan sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan harapan. Saat ini, seluruh kegiatan dan pelayanan kepegawaian masih berjalan sebagaimana mestinya dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2025, sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan serangkaian program yang mengacu kepada misi yang diuraikan kedalam tujuan, sasaran dan kebijakan serta realisasi dari 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Selanjutnya disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih diperlukan penyempurnaan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan memperoleh predikat yang semakin baik, dan sekaligus merupakan instrumen pendukung guna meningkatkan predikat penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian yang dapat kami laporkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 15 Juli 2025
Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002